**Bab I**

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Pada tahun 2007 rentetan krisis ekonomi melanda berbagai negara yang dimulai dari Amerika Serikat (AS), berlanjut ke benua Eropa dan Asia yang kemudian dikenal sebagai resesi ekonomi global. Negara-negara yang ada di *Euro Zone* pun tidak luput dari krisis ekonomi ini, penyebaran krisis pertama kali dimulai dari *Greece* (Yunani), Irlandia, Portugal, Spanyol dan Italia yang dikenal dengan PIIGS. Salah satu negara yang terkena krisis ekonomi terparah di *Euro Zone* adalah Yunani.

 Yunani adalah sebuah negara berkembang dengan standar kehidupan yang tinggi. Industri-industri utama Yunani adalah pariwisata, perkapalan, produk industri, pemrosesan makanan dan tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan dan perminyakan. Pertumbuhan GDP , rata-rata, sejak tahun 1990-an lebih tinggi daripada rata-rata negara anggota Uni Eropa.

Namun, ekonomi Yunani juga menghadapi permasalahan yang signifikan, termasuk naiknya tingkat pengangguran, birokrasi yang tidak efisien, penghindaran dari pajak dan korupsi. Yunani menderita dari korupsi ekonomi dan politik yang tinggi serta kompetisi global yang rendah bila dibandingkan dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.[[1]](#footnote-1)

Salah satu isu utama dalam Uni Eropa adalah krisis ekonomi dan politik di Yunani yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009. Kedua, defisit keuangan pemerintah dan utang publik yang sangat besar dari sejumlah negara zona euro. Ketiga, kegagalan pemerintah Yunani dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Krisis ekonomi Yunani juga membuat negara-negara anggota Uni Eropa lainnya ikut terkena krisis, seperti Portugal, Italia, Irlandia, dan Spanyol. Krisis Yunani semakin buruk pada tahun 2011 yang dapat mengancam kelangsungan mata uang tunggal, *Euro*.

Bagi para ekonom, krisis Yunani disebabkan oleh pola ekonomi domestiknya yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi Yunani yang berkelanjutan. Pendapat yang dikemukakan tersebut cukup beralasan, karena Yunani memiliki pengeluaran besar namun tidak efisien di sektor public, baik pengeluaran untuk gaji pegawai maupun dana pensiun, terjadinya penggelapan pajak, serta diperparah juga dengan kurangnya kesadaran akan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak.

Menurut laporan tahunan dari Komisi Eropa, rasio utang publik terhadap PDB di 17 negara zona euro terus meroket setelah krisis ekonomi global 2008-2009. Untuk tahun 2011, rasio itu diperkirakan mencapai hampir 88 persen dan akan bertambah menjadi 88,7 persen dari PDB pada tahun 2012.

Ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah negara, karena apabila sebuah negara terkena krisis maka kestabilan ekonomi akan menjadi pertaruhan kelanjutan perekonomian suatu negara. Krisis yang terjadi di Yunani bermula dari krisis ekonomi ternyata membuat politik di Yunani juga ikut terkena imbasnya, karena pengambilan keputusan dari pengelolaan krisis di Yunani juga diambil oleh partai politik yang ada di Yunani, yang membuat persaingan partai politik di Yunani semakin berat karena terdapat pihak yang pro dan kontra terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh Yunani sebagai suatu negara selanjutnya.

Yunani (Greece) adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yaitu sistem ekonomi yang pada hakikatnya, segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan azas manfaat ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan material sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk tentu diberlakukan sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini tidak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa).

Bergabungnya Yunani dalam Komunitas Eropa sebenarnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, namun Yunani kesulitan beradaptasi dengan kompetisi pasar karena industri di Eropa Utara sudah lebih maju dan mapan. Akibatnya, terjadi penurunan PDB per kapita yakni dari 58% PDB per kapita rata-rata ME di tahun 1980, menjadi 52 % pada tahun 1991. Antara tahun1980-1990-an, Yunani memiliki utang yang besar terkait dengan defisit anggaran.

Yunani resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981. Sebagai negara anggota Uni Eropa, tentunya semua kebijakan negara baik itu kebijakan ekonomi maupun politik akan berpengaruh terhadap stabilitas Uni Eropa, karena pada Januari 2002 Yunani juga resmi bergabung dengan eurozone dan mulai mengadopsi euro sebagai mata uang menggantikan *drachma* sebagai mata uang Yunani sebelumnya.

Bila ditilik ke belakang, Yunani menjadi satu-satunya anggota Komunitas Eropa yang ingin menjadi bagian dari Perjanjian *Maastricht* namun tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan oleh inflasi, defisit anggaran, utang, dan suku bunga tinggi yang dimiliki oleh Yunani. Kemudian Yunani berusaha memperbaiki perekonomiannya dengan program penghematan dan usaha ini membuahkan hasil positif. Yunani akhirnya dapat memenuhi kriteria; inflasi 2,1%, defisit anggaran 1,7% dari PDB (di bawah 3% ketetapan Perjanjian *Maastricht)* dan resmi tahun 2001 Yunani dapat bergabung dengan Uni Eropa. Dalam perjalanan selanjutnya, Yunani tergabung dalam zona *Euro*. Namun, pada akhirnya terkuak fakta bahwa data-data ekonomi yang memuluskan langkah Yunani menjadi bagian dari zona *euro* adalah semua hasil rekayasa.

Permasalahan fiskal yang terjadi di Yunani mulai menjadi perhatian dunia internasional setelah pemilihan legislatif pada Oktober 2009. Beberapa minggu setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani, George Papandreou mengumumkan bahwa persentase defisit Yunani sebenarnya mencapai 12,7% dari jumlah PDB. Jumlah ini tentunya memiliki selisih yang jauh dari total defisit yang diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Costas Karamanlis, yaitu sebesar 6%. Defisit fiskal Yunani semakin memburuk secara signifikan seiring dengan memburuknya dampak krisis ekonomi global 2008 yang melanda tidak hanya negara di Eropa, melainkan hampir seluruh negara di dunia. Setelah mengalami dinamika perekonomian yang fluktuatif, akhirnya pada tahun 2009 Yunani memasuki resesi yang berkepanjangan. Defisit fiskal yang Yunani yang terakumulasi dari hutang yang membengkak memicu terjadinya Krisis Ekonomi. *Balance of payment* Yunani sendiri selalu menunjukkan angka defisit yang konsisten jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya khususnya di Eropa.

Yunani sebenarnya sudah mengalami masalah defisit anggaran dan utang publik jauh sebelum krisis ekonomi global itu terjadi. Negara-negara zona euro yang juga mengalami kondisi relatif sama seperti Yunani (defisit anggaran dan/atau pemerintah yang sangat besar) antara lain Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia. Menurut laporan tahunan Komisi Eropa yang dikeluarkan di Brussels, Belgia, 12 September 2011, negara-negara tersebut menghadapi potensi krisis utang lebih parah. [[2]](#footnote-2)

Menurut analisis dari Surendro (2010), kondisi fiskal Yunani yang buruk tersebut sebenarnya mencuat pada triwulan keempat tahun 2009 ketika pemerintah negara tersebut melaporkan revisi perkiraan defisit fiskal negara itu kepada *Eurostat*. Defisit keuangan pemerintah Yunani yang semula dilaporkan hanya sekitar 3,7 persen terhadap PDB, menjadi sangat besar di dalam laporan revisi tersebut yang mencapai sekitar 13,6 persen dari PDB. Jumlah utang Yunani juga paling besar setelah Italia di dalam kelompok zona euro per 21 Juli 2011 tercatat mencapai 350 miliar euro (setara dengan 499 miliar dollar AS), atau sekitar 160 persen dari PDB, dan pada akhir Juli 2011 menjadi kurang lebih 172 persen dari PDB yang dianggap sebagai batas aman.

Sampai saat ini, kemungkinan rasio utang terhadap PDB Yunani masih akan terus naik secara signifikan. Kondisi Yunani menjadi semakin parah menyusul keluarnya pernyataan resmi dari pemerintah mengenai ketidak mampuan Yunani membayar utangnya, yang telah dinyatakan jatuh tempo sebanyak 8,5 miliar euro pada tanggal 19 Mei 2010, kecuali jika pemerintah Yunani bisa mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa dan IMF.[[3]](#footnote-3) Sayangnya, berbagai paket kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Yunani dan bantuan Internasional dari pihak otoritas terkait pun masih belum cukup untuk menyelamatkan Yunani dari keterpurukan dan krisis yang berkelanjutan hingga saat ini.

Krisis yang terjadi di Yunani pada tahun 2009 sampai saat ini membuat kestabilan organisasi kawasan ini juga terkena dampaknya, salah satunya jatuhnya nilai euro. Keputusan membuat euro sebagai mata uang tunggal ternyata juga membawa dampak buruk bagi perekonomian Uni Eropa. Sejak krisis Yunani ini, terjadi penurunan kepercayaan mata uang Euro secara signifikan dari investor-investor asing di Eropa.

Krisis Yunani menunjukkan berbagai sikap yang berbeda diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara anggota mempunyai semangat dan sudut pandang berbeda dalam menyelamatkan Yunani sebagai negara anggota organisasi Uni Eropa. Hal ini dikarenakan awal kehadiran mereka membentuk dan ikut serta dalam keanggotaan Uni Eropa tentu dikarenakan kepentingan yang berbeda-beda yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Kurangnya kontrol terhadap pengaturan kebijakan fiskal terhadap negara anggota yang memakai mata uang Euro juga menjadi sorotan.

Melalui krisis ini terlihat bahwa Bank Sentral Eropa seperti kehilangan kontrol terhadap kebijakan fiskal negara-negara anggota Uni Eropa. Tentunya krisis ini mengakibatkan efek domino terhadap negara-negara anggota Uni Eropa lainnya terutama yang tergolong lemah.

Banyak pihak mulai menanyakan keberadaan, kemapanan serta kesolidan diantara para anggota Uni Eropa. Isu ini di landasi kenyataan yang ada mengenai ketidak mampuan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di zona eropa. Apalagi kemudian juga muncul wacana untuk mengeluarkan Yunani dari zona euro. Hal ini tentunya didasarkan akan kekuatiran yang beralasan, disamping ada negara-negara di Uni Eropa yang tidak mematuhi kesepakatan, pemalsuan laporan kualifikasi Yunani yang telah berhasil mengelabui Uni Eropa bertahun-tahun membuat masyarakat internasional semakin meragukan kredibilitas Uni Eropa sebagai organisasi regional yang mapan. Padahal Uni Eropa memiliki Bank Sentral Eropa yang bekerja yang dikelola berdasarkan *European System of* *Central Banks* (ESCB) untuk menjaga stabilitas harga dalam Uni Eropa dengan cara menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan moneter negara anggota, menentukan nilai tukar euro dengan mata uang nasional, memegang dan mengelola nilai tukar mata uang resmi negara anggota, dan mempromosikan kelancaran sistem pembayaran.[[4]](#footnote-4)

Berlandaskan segenap permasalahan yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa krisis yang melanda negara-negara Eropa, khususnya Yunani memiliki dampak atau efek yang signifikan dan berskala regional, terlebih dampak yang mengancam kredibilitas dan eksistensi dari Uni Eropa sebagai organisasi regional yang mana Yunani pada saat ini menjadi anggota organisasi tersebut.

Hingga saat ini, perjalanan penyelesaian krisis yang melanda Yunani telah sampai pada tahap penyelesaian krisis tersebut. Penulis sangat tertarik dan ingin mengetahui peran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai organisiasi regional terbesar di *euro zone*, dan bagaimana setiap kebijakan tersebut mampu menyelesaikan krisis dan menyelamatkan Yunani sebagai sebuah negara yang merupakan negara pelopor peradaban barat.

 Bertitik tolak dari penjelasan diatas, penulis memilih judul penelitian sebagai berikut :

**“Kebijakan Uni Eropa dan Implikasinya terhadap Penyelesaian Krisis Ekonomi Yunani ”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta terkait dengan judul skripsi yang peneliti ambil, permasalahan yang muncul dalam tema penelitian, dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana krisis ekonomi yang melanda Yunani dimulai?
2. Mengapa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan ekonomi skala regional terhadap krisis ekonomi Yunani?
3. Sejauh mana kebijakan Uni Eropa dapat mengatasi krisis ekonomi Yunani?

**1. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan ruang lingkup pembahasan pada :

1. **Pembatasan Tema :**

Berfokuskan pada serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam penyelesaian krisis ekonomi Yunani, yang mana melibatkan IMF dan negara-negara zona Eropa, serta efektifitas Uni Eropa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

1. **Pembatasan Periodisasi Waktu :**

Periode Tahun 2009 sampai sekarang. Tahun 2009 merupakan tahun dimana krisis ekonomi Yunani mulai mengancam kestabilan ekonomi global, khususnya regional (zona Eropa).

**2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut : **“Bagaimana Kebijakan yang Dikeluarkan Uni Eropa Dalam Rangka Penyelesaian Krisis Ekonomi Yunani?”**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban akan masalah yang telah dituangkan dalam identifikasi masalah penelitian, tentang peran dan kebijakan Uni Eropa serta implikasinya terhadap krisis ekonomi Yunani, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa berbagai macam sebab dan latar belakang terjadinya krisis ekonomi Yunani, yang mengancam eksistensi Yunani sebagai suatu negara, hingga kestabilan ekonomi regional (zona eropa).
2. Mengetahui dan menganalisa mengapa Uni Eropa menjadikan Yunani prioritas dan memberikan bantuan keuangan skala regional untuk membantu penyelesaian krisis ekonominya.
3. Mengetahui, menganalisa, dan memahami sejauh mana krisis ekonomi Yunani memiliki dampak yang akan mempengaruhi perekonomian negara zona eropa lainnya.
4. Mengetahui, menganalisa dan menjabarkan bagaimana setiap kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi Yunani.
5. **Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bukan hanya untuk kebutuhan penulis pribadi, namun juga bagi pembaca yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi, khususnya krisis ekonomi Yunani, serta kontribusi positif lainnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Studi Strata S-1 dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai pembanding dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema atau topik yang sama, yaitu seputar krisis ekonomi serta peran organisasi regional dalam penyelesaiannya.
3. Sebagai masukan dalam khasanah keilmuan Hubungan Internasional yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisa teori interdependensi serta regionalisme dalam konstelasi ekonomi dan politik internasional.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

1. **Kerangka Teoritis**

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang di dalamnya berisi teori-teori para pakar yang memiliki korelasi dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Adapun teori tentang Hubungan Internasional, kerjasama internasional, regionalism sampai dengan krisis ekonomi.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan. Dan ditopang oleh pendapat para pakar hubungan internasional dan para pakar yang kompeten dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan diharapkan bisa dipertanggung jawabkan secara akademis.

Teori pertama yang merupakan teori yang mewakili Premis Mayor (core subject HI) adalah teori Hubungan Internasional. **Warsito Sunaryo** menyatakan bahwa ;

*“Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan - kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.Adapun yang dimaksud dengan kesatuan - kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.”*

Dalam penelitian ini, jenis kesatuan social tertentu yang sesuai dengan pengertian hubungan internasional menurut **Sunaryo**, adalah Uni Eropa yang merupakan representative dari organisasi internasional dan Yunani sebagai negara bangsa yang saling berinteraksi serta memiliki hubungan timbal balik.

Selain teori diatas, konsep hubungan internasional yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah konsep yang dipaparkan oleh **Sprout & Sprout** (1962). Yang memandang bahwa ;

*“Studi hubungan internasional membahas mengenai aktor-aktor (negara, pemerintah, pemimpin, diplomat, masyarakat) yang bertujuan mencapai maksud-maksud tertentu (sasaran, tujuan, harapan) dengan menggunakan sarana-sarana (seperti diplomasi, pemaksanaan, persuasi) yang dikaitkan dengan power atau kapabilitasnya.”*

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Istilah Hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Ilmu hubungan internasional dalam perkembangannya menghasilkan mashab-mashab dan ilmu baru, yang mana memberikan kompleksitas dan landasan baru yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk diimplementasikan oleh para actor hubungan internasional. Salah satu ilmu yang diturunkan oleh hubungan internasional itu sendiri adalah ekonomi internasional.

Penulis menyertakan teori **Ekonomi Internasional** sebagai salah satu teori yang juga mewakili premis mayor (*Core Subject HI*), dan teori yang melandasi interaksi yang terjadi antara Yunani dan Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis di Yunani. Seperti yang dikemukakan oleh **Boediono** bahwa :

*“Ekonomi merupakan aktifitas dimana suatu individu atau kelompok mencari keuntungan atau pendapatan sebesar-besarnya dengan modal atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Dan Ekonomi atau perdagangan internasional diartikan sebagai aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh negara atau actor hubungan internasional yang berlandaskan kebijakan-kebijakan ekonomi, yang bertujuan memenuhi kebutuhan setiap negara atau actor hubungan internasional tersebut.”*

Krisis yang terjadi di Yunani dan dunia, tidak akan terjadi jika dunia dan system global tidak memiliki pasar atau memiliki interaksi perdagangan yang memberikan dampak *fail* dan *gain* kepada actor-aktor yang melakukan atau yang terlibat dalam perdagangan dan pasar tersebut. Lebih jauh lagi, zona eropa dengan integrasi ekonominya merupakan sebuah hasil implementasi dari teori Ekonomi Internasional.

Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Yunani dan Uni Eropa, serta kerjasama yang dilakukan keduanya dengan organisasi atau negara lain dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi di zona eropa, penulis menyertakan konsep atau teori kerjasama internasional sebagai acuan.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda, sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidaklah sama. Hal ini menjadikan negara membutuhkan kemampuan yang negara lain atau actor hubungan internasional lain hingga organisasi internasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patutu dipelihara dan diadakan satu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar actor hubungan internasional yang bekerjasama.

Menurut **Kalevi Jaakko Holsti**, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. *Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.*
2. *Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.*
3. *Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.*
4. *Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.*
5. *Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan setiap pihak.[[5]](#footnote-5)*

Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai hal ini, **Koesnadi Kartasasmita** mengatakan bahwa *kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.[[6]](#footnote-6)*

Mencermati Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yang dalam penelitian ini adalah Yunani untuk mengatasi krisis ekonomi negaranya, yang tidak mampu Yunani selesaikan sendiri. Untuk itu negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota terlibat. Tanpa adanya penghargaan, tidak mungkin akan dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.[[7]](#footnote-7)

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah (konflik atau krisis) diantara dua atau lebih negara yang terkait.

Dalam penelitian ini, Uni Eropa dan Yunani memiliki tujuan dan harapan yang sama, yaitu mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi di zona eropa, khususnya negara Yunani sendiri yang menjadi negara dengan krisis paling parah. Keduanya baik itu Uni Eropa dan Yunani bersama menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan kapabilitas dan otoritasnya untuk menyelesaikan krisis tersebut dengan berbagai tahapan penyelesaian.

Sebelum Yunani sebagai suatu negara terintegrasikan dalam suatu regional atau kawasan, negara tersebut akan senantiasa mempertimbangkan segala kebutuhan dan kepentingan nasionalnya yang dijadikan sebuah politik luar negeri. Seperti yang dikemukakan oleh **Rosenau**, tentang politik luar negeri, yaitu : *“Salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Neger merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.”[[8]](#footnote-8)*

Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilkinya.[[9]](#footnote-9)

Politik luar negeri senantiasa memiliki tujuan. Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu damn aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebaijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuasn politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Disisi lain **Jack Plano**, yang menyampaikan pendapatnya mengenai politik dan kebijakan luar negeri, yang ia nyatakan sebagai berikut :

*“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”[[10]](#footnote-10)*

Berkaitan dengan setiap kebijakan suatu negara atau organisasi, akan senantiasa berpijak pada landasan sesuai kebutuhan, yang diputuskan dalam suatu perumusan dan pemutusan kebijakan. Penulis menyertakan teori pembuatan kebijakan yang merupakan Premis Minor (Premis Implementatif), yang dalam penelitian ini merupakan kebijakan Uni Eropa dalam menyelesaikan krisis ekonomi di negara Yunani.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentutkan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Begitupula dengan kebijakan luar negeri Yunani yang memutuskan untuk bergabung dengan Uni Eropa serta melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara anggotanya, merupakan bentuk Yunani dalam rangka memenuhi segala kepentingan nasional negaranya.

**Jack Plano** juga menyampaikan mengenai langkah-langkah perumusan kebijakan, yang diantaranya adalah :

* *menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik;*
* *menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri;*
* *menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki;*
* *mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan;*
* *melaksanakan tindakan yang diperlukan;*
* *secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangjau tujuan atau hasil yang dikehendaki.[[11]](#footnote-11)*

Uni Eropa yang dalam permasalahan yang penulis angkat, yang merupakan organisasi regional, memiliki hak dan kewajiban serta otoritas dalam menyelesaikan konflik (tujuan bersama) yang berkaitan dengan negara anggota organisasinya, hal itu penulis angkat berlandaskan acuan yang diungkapkan oleh **Teuku May Rudy**, mengenai organisasi internasional, yang mengungkapkan bahwa ;

*“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda.”*

Uni Eropa adalah sebuah IGO *(International Governmental Organization)* yang pada dasarnya negara-negara anggotanya telah menyerahkan sebagian kedaulatan mereka kepada Uni Eropa, sehingga ia dikatakan *Supranational IGO*. Bahkan UE telah menjadi salah satu dari tujuan-tujuan yang diungkapkan melalui penyatuan kebijakan politik, ekonomi, sosial, luar negeri, dan pertahanan negara-negara anggotanya.

Peranan organisasi internasional menurut **Clive Archer** (1983: 136-137) adalah sebagai berikut (**T. May Rudy**, 2005: 29):

* *Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.*
* *Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement dan lain sebagainya).*
* *Pelaku (aktor), bahwa organisasi interasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.*

Untuk fungsi dari organisasi internasional, menurut **Clive Archer** (1983: 152-169) ada sembilan fungsi dari organisasi internasional yakni sebagai berikut (**T. May Rudy**, 2005: 29) :

* *Artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota;*
* *Menghasilkan norma-norma (rejim);*
* *Rekrutmen;*
* *Sosialisasi;*
* *Pembuatan keputusan (rule making);*
* *Penerapan keputusan (rule application);*
* *Penilaian/penyelarasan keputusan (rule adjunstion);*
* *Tempat memperoleh informasi;*
* *Operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan.*

Selain itu **Robert Keohane** dan **Joseph Nye** berpendapat bahwa hubungan antar negara barat dicorakan oleh Interdependensi Kompleks.

“*Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi tersebut memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi tersebut dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktifitas atau isu bersama.”[[12]](#footnote-12)*

Uni Eropa menjadi organisasi yang mewadahi kepentingan nasional negara-negara zona eropa yang pada dasarnya memiliki karakteristik regionalisme, kepentingan-kepentingan tersebut bisa kemudian diterjemahkan menjadi kerjasama antar negara anggota dan perjanjian-perjanjian yang memberikan manfaat untuk negara-negara terkait. Namun sebelum hal itu terjadi, organisasi regional seperti Uni Eropa jelas mengadopsi teori regionalism dalam pembentukannya.

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. **Menurut Louis Cantori** dan **Steven Spiegel** dalam *Pengantar* *Ilmu Hubungan Internasional*, medefinisikan kawasan sebagai berikut :

*“Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.”*

Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian,yaitu *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggirankawasan) dan *intrusive system* (negara eksternal kawasan yang dapatberpartisipasi dalam interaksi kawasan). Mereka juga menyatakan, setidaknya adaempat variabel yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara negara dalamkawasan, yaitu sifat dan kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksidiantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimilikiaktor kawasan dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.

Dekade 1960-an hingga 1970-an merupakan gelombang pertama analisis regionalisme yang secara khusus menekankan pada pengaruh Perang Dingin terhadap pertumbuhan institusi regional di Eropa dan negara-negara dunia ketiga. Sementara pada era 1990-an muncul gejala regionalisme baru dimana dimensi ekonomi mengemuka sebagai salah satu pendorong utama tumbuhnya pengaturan-pengaturan kawasan.

**Menurut Anak Agung Banyu Perwita** dan **Yanyan Mochammad Yani** dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa terdapat tiga tahap penting dalam proses pertumbuhan regionalisme, yaitu :

*“Tahap pertama disebut sebagai “pre-regional stage‟ dimana beberapa negara bersepakat untuk membentuk interaksi social bersama dalam suatu unit geografis tertentu. Tahap kedua adalah upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap terakhir adala output dari proses regionalisasi dimana pembentukan indentitas bersama, kapasitas institusional dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional.”*

**R. Stubbs** dan **G. Underhill** yang dikutip oleh Perwita dan Yani dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme. Elemen yang pertama yaitu, kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatukawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi maka akansemakin tinggi pula derajat interaksinya. Dikarenakan kesamaan sejarah danmasalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional danidentitas yang sama (*regional awarness and identity*).

Kedua, adanya keterkaitan yang sangat erat di antara mereka terhadap suatu batas “kawasan atau dimensi ruang” dalam interaksi mereka (*spatial dimension* *of regionalism*). Ketiga, terdapatnya kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi diantara mereka dan menyediakan „aturan main‟ dalam kawasan. Elemen ini pula yang akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan.

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi reional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai “integrasi dangkal” (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa “integrasi dalam” (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiscal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Bentuk berikutnya adalah *Inter-regionalism* dan *Regional* *transnationalism*. Bentuk ini mengacu kepada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor non negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. Interregionalism juga merujuk kepada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah hubungan antar kelompok / organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN.

Bentuk kedua adalah hubungan *bi-regional* (dua kawasan) dan *transregional* (antar kawasan). APEC yang terbentuk 1989 yang merupakan hasil dari bentuk *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Selatan. Kemudian adanya ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang merupakan bentuk dari *bi-regional* Asia dan Eropa. Lalu adanya kerjasama antara Eropa dengan Amerika Latin yang tergabung dalam *European-Latin America Summit* yang dibentuk pada 1999, serta *The Africa-EU Summit* antara negara-negara di Afrika dengan Eropa.

Bentuk ketiga adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single* *power*. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan semacam ini kerapkali memakai peranan dominan dalam kerjasamanya. Misalnya, mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan di Eropa dan kadang mengganggu hubungan trans-atlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa.[[13]](#footnote-13)

Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional.

Selain itu, ketika suatu negara yang telah terintegrasikan dalam suatu regionalisme, bahkan jika sudah terintegrasi dalam bentuk organisasi regional, akan saling memiliki keterkaitan. Apabila suatu negara mengalami konflik atau krisis, maka dampak yang akan diterima bukan hanya berlaku untuk satu negara bermasalah saja, tetapi akan mencakup keseluruhan negara-negara di *region* atau kawasan tersebut. Ketika Yunani mengalami krisis finansial sampai saat ini, maka dampak yang dirasakan bukan hanya bagi Yunani saja, namun juga bagi seluruh negara yang terdapat di zona eropa dan anggota Uni Eropa.

Krisis ekonomi Yunani yang memiliki dampak domino terhadap negara-negara eropa merupakan sebuah resiko yang harus ditanggung oleh seluruh negara kawasan eropa, termasuk Uni Eropa di dalamnya. Hal itu dikarenakan integrasi ekonomi yang telah penulis sampaikan pada paparan teori *regionalism* sebelumnya. Bagi Yunani sendiri, krisis tersebut telah membawa Yunani ke ambang kegagalan sebagai sebuah negara. Dimana krisis sendiri menurut **Three Distinc School**, yang memaparkan bahwa krisis memiliki karakteristik fundamentalis ;

*“Krisis fundamentalist dengan istilahnya yaitu rational panic, bahwa krisis tersebut ialah sesuatu yang tidak dapat diantisipasi yang diikuti oleh penyesuaian nilai tukar yang terlampau besar. Selanjutnya ada yang disebut dengan hubungan keuangan antara satu Negara dengan Negara lain. Hal ini didukung oleh teori regionalisme yang sarat akan efek domino."*

Hal itu sejalan dengan kondisi krisis yang melanda Eropa saat ini, dengan Yunani sebagai pemicunya, memberikan dampak yang membuat seluruh negara di kawasan tersebut turut mengalami krisis. Mau tidak mau Eropa harus bahu-membahu menangani krisis ini bersama-sama. Karena jika tidak, kredibilitas Eropa sebagai benua yang memiliki peradaban yang mapan, akan mengalami kehancuran.

Selain teori krisis yang dipaparkan diatas, **Bernanke & Getler** dengan teori *Open Economy*-nya juga turut memaparkan krisis yang terjadi di Yunani dan Eropa saat ini. Keduanya menyampaikan bahwa :

*“Krisis akan tercipta apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik, kemudian ditambah dengan adanya krisis keuangan di Negara lain yang diduga oleh para investor akan terjadi juga di Negara lainnya, serta adanya manipulasi pasar oleh spekulan-spekulan besar, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar secara mendadak. Hal inilah yang menyebabkan kehancuran dalam neraca pembayaran sehingga mengakibatkan terjadinya krisis.”*

Teori tersebut juga dapat dikatakan tepat mengingat Yunani melakukan kecurangan dalam proses administrasi saat negara tersebut mengajukan keanggotaan Uni Eropa. Ketika kecurangan tersebut diketahui public dan Uni Eropa sendiri, semuanya sudah terlambat, ketika Yunani sudah di dalam krisis karena kegagalan pasar dan pembangunan ekonomi domestiknya.

1. **Kerangka Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**“Kebijakan Uni Eropa menciptakan peluang dan babak baru bagi perbaikan ekonomi, dengan berbagai tahapan penyelesaian termasuk kebijakan keuangan regional dimana Uni Eropa melakukan pembentukan konsorsium khusus, paket *bail-out,* pemberian dana bantuan darurat dan inisiasi akan negosiasi antar negara, yang memungkinkan negara kawasan eropa memberikan bantuan yang berimplikasi terhadap krisis ekonomi Yunani, sehingga Yunani dapat melunasi hutang luar negeri dan mengembalikan kestabilan negaranya.”**

1. **Pengujian Hipotesis / Verifikasi Data**

**Tabel 1. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel (Hipotesis)** | **Indikator** | **Analisa Data**  |
| ***Variabel Bebas:*** Kebijakan Uni Eropa menciptakan peluang dan babak baru bagi perbaikan ekonomi, dengan berbagai tahapan penyelesaian termasuk kebijakan keuangan global dimana Uni Eropa melakukan pembentukan konsorsium khusus, paket *bail-out,* pemberian dana bantuan darurat dan inisiasi akan negosiasi antar negara, yang memungkinkan negara kawasan eropa memberikan bantuan | 1. Kebijakan Keuangan Regional.
 | * Pembentukan Konsorsium Trioka (komite khusus), yang ditujukan untuk membantu Uni Eropa mengelola Krisis Yunani. Terdiri dari *Europe Commision, IMF, and Europe Central Bank*. (http://www.imf.org/external/pubs/ft/ survey/so/2010/ car050210a.htm)
* Paket *Bail-out* yang dikeluarkan Uni Eropa dan Konsorsium Trioka. Dana bail-out diberikan berdasarkan periode: April 2010 PM George Papandreou meminta bailout internasional. paket bantuan darurat dari Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Dana Moneter Internasional. Mei 2010 IMF dan para pemimpin zona euro menyetujui € 110.miliar ($ 143 miliar) paket bailout yang akan berlaku selama tiga tahun ke depan. Maret 2014 Yunani menerima bailout berikutnya. (<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/>)
* Paket Penyesuaian Ekonomi. Paket yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai syarat *bailout* kepada Yunani. Yang didalamnya termasuk reformasi fiscal, finansial, dan structural. (Anonim. *Langkah-langkah Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani*. Pdf. 2015)
* Pemberian Fasilitas Stabilitas Finansial Eropa. Merupakan paket penyesuaian ekonomi ke-2 yang diberikan Uni Eropa kepada Yunani. Secara total, bantuan dana program kedua yang dikeluarkan sekitar €164,5 miliar sampai akhir 2014. Dari jumlah ini, komitmen zona *euro* memberikan bantuan sebesar €144,7 miliar yang akan diberikan melalui EFSF, sedangkan IMF memberikan kontribusi sebesar €19,8 miliar. (<http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/_efs>.)
* Penerapan Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas. Untuk terus menjaga stabilitas finansial dalam pengadopsian *euro*, dengan menjadikan *Convergence Criteria* (Kriteria Konvergensi) sebagai dasar, negara-negara anggota *Eurozone* (Zona Eropa) meratifikasi *Stability and Growth Pact* (Pakta Pertumbuhan dan Stabilitas) sebagai panduan dalam menjaga perekonomian. (http://www.ecb.int/ecb/education/facts/orga/ html/or\_012.en. html.)
* Pemberian Dana Bantuan Darurat (Emergency Liquidity Assistance). Bank Sentral Eropa memutuskan untuk  menaikkan dana bantuan darurat  atau Emergency Liquidity Assistance (ELA)  kepada bank-bank di Yunani, setelah para menteri keuangan zona euro menyetujui untuk memberikan pinjaman jangka pendek ke Yunani. (<http://vibiznews.com/2015/07/16/ecb-menambah-dana-ela-untuk-bank-bank-di-yunani/>)
 |
|  | 1. Negosiasi perihal bantuan keuangan antar negara anggota Uni Eropa.
 | * Uni Eropa memfasilitasi Yunani untuk bernegosiasi dengan pihak Jerman dan negara eropa lainnya dalam rangka memuluskan proposal bail-out dan pengelolaan krisis Yunani serta kemungkinan referendum Yunani.

(Gianviti, Francois, dkk. 2010, *A European Mechanism for Sovereign Debt Crisis Resolution: A Proposal*, hal 3, Bruegel Blueprint Series, Brussels.) |
| ***Variabel Terikat:*** berimplikasi terhadap krisis ekonomi Yunani, sehingga Yunani dapat melunasi hutang luar negeri dan mengembalikan kestabilan negaranya. | 1. Program penghematan anggaran dan Reformasi Keuangan
 | * Paket penghematan 1-7 yang diberlakukan mulai 9 Februari 2010 sampai dengan 17 Juni 2013. Paket itu berisi penghematan pembekuan gaji dan pemotongan bonus, sampai dengan rekapitulasi bank, reformasi pajak, reformasi tenaga kerja dan PHK ribuan pekerja. (<http://vibiznews.com/2015/07/02/kronologi-krisis-yunani-2009-2015/>)
 |
| 1. Pelunasan hutang keapada IMF dan Bank Sentral Eropa.
 | * Yunani melunasi utangnya kepada IMF dan juga ECB sebanyak 6,25 miliar euro ($ 6800000000), kepada lembaga pinjaman internasional-IMF negara anggota kawasan Euro ini membayar sekitar 2 miliar Euro.

(http://vibiznews.com/2015/07/20/yunani-lunasi-tunggakan-tidak-lagi-berutang-kepada-imf/) |
| 1. Peningkatan rating kredit negara Yunani.
 | * Standard & Poor menaikkan peringkat kredit pemerintah Yunani menjadi CCC + dari CCC-. Perusahaan pemeringkat kredit tersebut juga merevisi outlook negara Yunani menjadi stabil dari negatif. (<http://vibiznews.com/2015/07/22/sp-naikkan-rating-kredit-yunani-ke-ccc/>)
 |
|  | 1. Yunani mencetak surplus perdagangan pertama.
 | * Tercatat dalam transaksi perdagangan Mei 2015, Yunani mendapatkan surplus perdagangan pertama. Surplus tersebut dicapai sebagian besar karena penerimaan perdagangan  barang dan jasa pada bulan tersebut. Neraca transaksi berjalan negeri tersebut surplus EUR 407.2 juta  pada bulan Mei. (<http://vibiznews.com/2015/07/21/neraca-perdagangan-yunani-berhasil-cetak-surplus-dari-7-bulan-defisit/>)
 |

1. **Skema Kerangka Teoritik**

**Alur Penyelesaian Krisis Ekonomi Yunani**

**Uni Eropa**

* **Pelunasan hutang ke IMF dan ECB**
* **Peningkatan rasio kredit negara Yunani**
* **Pencetakan surplus perdagangan pertama pasca krisis**

**Krisis Yunani**

* **Kebijakan keuangan regional**
* **Inisiasi negosiasi antar anggota**

**Konsorsium Troika**

**IMF**

**Komisi Keuangan Eropa**

**Bank Sentral Eropa**

**Ekonomi**

**E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

1. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis dalam penelitian ini menggunakan tingkat analisa induksionis, yang unit eksplanasinya (variabel bebas), yaitu Uni Eropa (system/regional) dalam penerapan kebijakannya, terhadap unit analisis (variable terikat), yaitu krisis ekonomi di Yunani (negara).

1. **Metode Penelitian**

Untuk keperluan penelitian dan penganalisaan penulis menggunakan **Metode Penelitian Deskriptif**. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan suatu kondisi dimana Uni Eropa bersama Yunani dan negara-negara eropa lainnya yang terkait bersinergi untuk menyelesaikan krisis ekonomi Yunani yang dapat memberikan dampak negative terhadap perekonomian regional (zona eropa).

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang mana peneliti berusaha untuk mencari data melalui pengamatan atau observasi tidak langsung dengan membaca buku, laporan (jurnal), surat kabar, *website* dan artikel untuk memperoleh pengertian, pengetahuan dan data yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

**F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

Dalam pengumpulan data dan segala bentuk informasi yang penulis butuhkan untuk digunakan sebagai data penelitian ini bertempat di lokasi sebagai berikut :

1. BPPK Kementrian Luar Negeri Direktorat Organisasi Internasional dan Amerika Eropa, Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan (UNPAS) Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.
3. Perpustakaan Umum Univeritas Katolik Parahyangan (UNPAR) Jl. Ciumbuleuit No. 94, Bandung.
4. **Lama Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan November 2015 sampai dengan April 2016.

**G. Sistematika Penulisan**

**Bab I : Pendahuluan**

Merupakan Bab yang menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah. Dimana disertakan juga tentang tujuan dan kegunaan penelitian, serta dilengkapi dengan kerangka teoritis dan hipotesis. Yang mana kedua kerangka tersebut dilengkapi dengan penjelasan akan operasionalisasi variable dan indicator, asumsi-asumsi, metode penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Umum Uni Eropa sebagai Organisasi Regional**

Dalam Bab ini, akan dibahas mengenai bagaimana sejarah awal mula Uni Eropa Terbentuk, tujuan dan organisasi seperti apa Uni Eropa, serta bagaimana Uni Eropa sebagai sebuah organisasi kawasan dalam mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Selain itu, dalam bab ini penulis akan memaparkan sejauh mana Uni Eropa sebagai sebuah organisasi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan organisasi Uni Eropa dan negara-negara anggotanya.

**Bab III :**  **Yunani dan Krisis Ekonomi**

Dalam Bab ini, akan dipaparkannya data dan fakta mengenai Yunani sebagai sebuah negara berdaulat. Termasuk data dan fakta bagaimana Yunani berperan di kawasan Eropa dan bergabung dengan Uni Eropa, bagaimana konflik atau krisis Yunani dapat terjadi serta sejauh mana perkembangan ruang lingkup dan proses krisis Yunani sampai pada saat ini.

**Bab IV : Implementasi Kebijakan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Yunani**

Dalam Bab ini akan membahas setiap tahapan atau proses penyelesaian krisis ekonomi Yunani sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam menyelesaikan krisis ekonomi. Juga memaparkan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam implementasi kebijakannya.

**Bab V : Penutup**

Merupakan Bab penutup dari penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan pembahasan.

1. Rizky Musafir. “*Faktor-Faktor Penghambat Uni Eropa Dalam Usaha Perbaikan Ekonomi dan Politik Yunani*”. Diakses melalui <http://repository.upnyk.ac.id/1562/1/SUMMARY.pdf>, pada tanggal 1 Desember 2015, pkl. 20.04 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tulus Tambunan. 2012. “*Memahami Krisis: Siasat Membangun Kebijakan Ekonomi*”. Jakarta: LP3ES [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Europa Summaries of European Union Legislation. *“The European Central Bank (ECB)”*. Diakses melalui http://europa.eu/legislation\_summaries/economic\_and\_monetary\_affairs/institutional\_and

\_economic\_framework/o10001\_en.htm, pada tanggal 3 Desember 2015, pkl. 16.09 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. K.J Holsti. *Politik IInternasional, kerangka Untuk Analisis, Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta : Erlangga. 1988. Hlm. 652-653. [↑](#footnote-ref-5)
6. Koesnadi Kartasasmita. Administrasi Internasional. Lembaga Penerbitan Sekolah TinggI Ilmu Administrasi. Bandung. 1997. Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sjamsumar Dam dan Riswandi. Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1995. Hlm 15-16. [↑](#footnote-ref-7)
8. James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New

York: The Free Press, hal. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, hal. 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Robert Jacson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005. Hlm. 63-64. [↑](#footnote-ref-12)
13. Louise Fawcett, “Regionalism from Historical Perspective”, dalam Mary Farrel, *et.al*. (2005) *Global Politics of Regionalism*. London: Pluto Press, hal. 24. [↑](#footnote-ref-13)